PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTARA PT. TASMA PUJA DI DESA KEPAYANG SARI DAN MASYARAKAT DESA ALIM KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh : Diki Aries Setiawan

Dosen Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang adanya lahan seluas lebih kurang 91 HA dari 110 HA yang terletak di wilayah Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu Provinsi Riau. Lahan tersebut dirampas oleh PT Tasma Puja itu berada di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku. Pemerintah tidak segera menentukan tapal batas Desa Kepayang Sari dengan Desa Alim. Upaya pemerintah dalam memediasi konflik sampai saat ini belum berhasil serta pihak LSM dan Desa Alim merasa pemerintah daerah memihak PT Tasma Puja hingga terjadi kekerasan dan ancaman pendudukan lahan oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik (Hidayat,2016) yang merupakan pengelolaan konflik dengan menggunakan serangkaian teknik atau langkahlangkah tertentu oleh pihak ketiga atau pihak yang berkonflik dalam upayanya untuk meminimalisir dampak negatif konflik dan mengarahkan konflik destruktif menjadi konflik konstruktif yang menguntungkan semua pihak. Adapun jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini mengeksplor dan menganalisa untuk memberikan arti dan makna dalam pemecahan masalah.

Kesimpulan Penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahan masyarakat Desa Kepayang Sari dan Desa Alim Kecamatan Batanag Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu adalah Rapat di kantor Desa Kepayang Sari baik dari perusahaan PT. Tasma puja maupun masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Memanggil pihak-pihak yang berkonflik untuk diadakan rapat dikantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu mencari jalan yang terbaik supaya kasus konflik tanah ini cepat selesai.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Reslusi Konflik, PT. Tasma Puja, Desa Aim, Desa Kepayang Sari

ABSTRACT

This study discusses the existence of approximately 91 HA of 110 HA of land located in the Alim Village area, Batang Cenaku District, Inhu Regency, Riau Province. The land was seized by PT Tasma Puja and is located in Kepayang Sari Village, Batang Cenaku District. The government did not immediately determine the boundary between Kepayang Sari Village and Alim Village. The government's efforts to mediate the conflict have not been successful so far and NGOs and Alim Village feel that the local government is siding with PT Tasma Puja, resulting in violence and threats of land occupation by the community.

This study uses conflict management theory (Hidayat, 2016) which is conflict management using a series of techniques or certain steps by a third party or conflicting parties in an effort to minimize the negative impact of conflict and direct destructive conflict into a constructive conflict that benefits all parties. The type of data in writing this thesis is descriptive qualitative where this study explores and analyzes to provide meaning and significance in solving problems.

The conclusion of this study is that efforts made to resolve land conflicts in Kepayang Sari Village and Alim Village, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency are meetings at the Kepayang Sari Village office, both from the company PT. Tasma Puja and the community to find the best solution.

Keywords: *Role of Local Government, Conflict Resolution, PT. Tasma Puja, Aim Village, Kepayang Sari Village*

• Latar Belakang masalah

Pemerintahan daerah Indragiri Hulu dinilai tidak melakukan kewajibannya dalam penyelesaian sengketa lahan antara Desa Alim dan Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku, seluas 92,36 dari 110 hektare yang dikuasai PT. Tasma Puja atas nama Desa Kepayang Sari. Untuk itu, BPN meminta kepada pihak terkait untuk menetapkan tapal batas antara ke dua (2) desa yang bersengketa, sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan (Andinis, 2021).

Dalam konflik ini ada actor-aktor pemerintahan yang harus terlibat dalam penyelesaian konflik ini diantaranya pemerintah Desa Alim, Desa Kepayang Sari dan andil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang diamanahkan undang-undang. Tidak kunjung selesainya konflik pertanahan ini mendorong peneliti untuk meneliti konflik pertanahan dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Menangani Konflik Antara PT. Tasma Puja, di Desa Kepayang Sari dan Masyarakat Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?”

• Pembahasan

1. Anatomi Konflik Pertanahan Di Batang Cenaku

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya. Konflik pertanahan di Indonesia sudah muncul sejak sebelum zaman kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat dari adanya konflik pertanahan akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir serta adanya kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada tuantuan tanah (agrarische wet). Pada era reformasi sekarang ini, intensitas konflik pertanahan meningkat tajam.

Hal ini terlihat dengan maraknya konflik pertanahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Diantaranya yang menonjol yaitu konflik pertanahan yang terjadi antara PT Tasma Puja, Desa Kepayang Sari dan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yaitu

urusan pertanahan. Sehingga dalam konflik pertanahan ini seharusnya pemerintah dapat andil mengambil bagian sebagai pelopor penyelesaian sengketa tersebut. Berikut Hasil Wawancara dengan Camat Batang Cenaku Bapak Budi Sumbari, SAB Tentang Konflik yang terjadi di kecamatan batang cenaku : “ Saat ini konflik yang terjadi di Kecamatan batang cenaku yaitu antara PT. Tasma Puja, Desa Alim Dan Desa Kepayang Sari menjadi banyak diperbincangkan, lantaran sengketa lahan yang tak berkesudahan meski sudah banyak kali dilakukan mediasi. Selain itu juga terjadi tumpang tidih dalam prses jual-beli, belum lagi warga yang melakukan penggarapan lahan di kawasan TNBT dan kawasan hutan. (Wawancra Senin, 18 Maret 2024)”

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya konflik pertanahan yang terjadi di Kecamatan Batang Cenaku sudah menjadi momok yang sulit untuk dihadapi. Antara masyarakat Desa dan PT. Tasma Puja memiliki pendapat yang berbeda sehingga konflik yang terjadi kian memanas. Pendapat ini juga diperkuat oleh Kepala Desa kepayang Sari Bapak Matjin, SE dalam wawancara berikut : ” Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 2011, konflik yang sepenuhnya merugikan masyarakat desa dikarenakan mengganggu aktivitas masyarakat saat hendak melakukan perlawanan.

Konflik ini terus berlanjut lantaran masyarakat tidak mau menerima permintaan Kerja sama dari PT. Tasma Puja yang mereka anggap telah merenggut paksa hak-hak mereka.” (Wawancara Senin, 19 Februari 2024) Dari wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa konflik ini sudah terjadi puluhan tahun hingga saat ini belum

juga ditemukan titik terang penyelesaiannya, justru semakin memanas dan semakin tegang dikarenakan masyarakat juga menjadi semakin tak terkendali. Resolusi konflik melalui manajemen konflik nampaknya menjadi upaya yang penting dalam penyelesaian konflik peranakan. Kerugian materi hingga jatuhnya korban jiwa menjadi resiko yang harus dialami masyarakat ketika mengalami konflik. Resolusi konflik menjadi harapan masyarakat agar proses penyelesaian konflik dapat menciptakan masyarakat yang harmonis. Untuk itu perlu kesediaan semua pihak yang berkonflik untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik.

Jika konflik disikapi dengan berorientasikan egosentris dan kepentingan sepihak, maka konflik akan selalu menjadi konflik tidak terselesaikan dalam kehidupan sosial.

2. Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Perkebunan Pada PT. Tasma Puja Di Desa Kepayang Sari

Salah satu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah memberikan peluang kepada masyarakat maupun perusahaan atau investor untuk mengelolah sumber daya daerah tersebut dengan mengacu kepada instrumen hukum berlaku yang dalam hal ini peraturan berkaitan dengan perizinan.

Izin merupakan keputusan pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pemerintah maupun investor. Perizinan harus mampu mengendalikan eksternalitas negatif yang mungkin terjadi karena dengan perizinan yang terlalu ketat akan mendorong aktifitas informal dalam ekonomi, namun perizinan yang terlalu longgar akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktifitas pasar yang tidak terkendali bahkan kehilangan hak masyarakat termasuk hilangnya hak masyarakat adat atas wilayahnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang saat ini yang mengundang banyak eksternalitas

negatif atau dalam konteks lain tingginya angka konflik adalah kebijakan perizinan di bidang kehutanan. Banyaknya izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah baik izin usaha pertambangan, izin perkebunan, izin pengelolaan hutan, izin wisata, izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya menimbulkan trush atau perlawanan dari masyarakat yang merasa haknya diganggu atau haknya dihilangkan termasuk hak masyarakat hukum adat.

Sering kebijakan Pemerintah Daerah tidak mempertimbangkan aspek hak masyarakat dengan alasan untuk kepentingan umum, namun realitasnya justru membawa kerugian bagi masyarakat terutama masyarakat adat dan bahkan kebijakan yang diambil dengan keputusan pemberian izin tidak dapat mendorong

peningkatan pendapatan asli daerah. Seperti yang terjadi pada saat ini.

Lahan seluas lebih kurang 91 HA dari 110 HA tersebut terletak di wilayah Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu Provinsi Riau. Tokoh pemuda Desa Alim beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa masyarakat Desa Alim siap mengambil kembali tanah tersebut meski harus menumpahkan darah. Konflik menjadi lebih rumit karena konflik warga Desa Alim dengan PT Tasma Puja harus diselesaikan lebih awal ditingkat desa. Karena lahan yang dituduh dirampas oleh PT Tasma Puja itu berada di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku.

Desa Alim merasa Lahan yang diduga dikuasai oleh PT Tasma Puja itu bekas garapan warga Desa Alim. Namun, lahan yang digarap warga Desa Alim itu berada dalam wilayah Desa Kepayang Sari. Sehingga perlu didudukkan tapal batas kedua desa tersebut yakni Desa Alim dan Desa Kepayang Sari. Berdasarkan wawancara diatas maka diperlukan untuk menemukan langkah-langkah penyelesaian terhadap konflik yang saat ini tengah terjadi

antara PT. Tasma Puja, Desa Alim Dan Desa Kepayang sari terkait sengketa Pertanahan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahan masyarakat Desa Kepayang Sari dan Desa Alim Kecamatan Batanag Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut: 1. Rapat di kantor Desa Kepayang Sari baik dari perusahaan PT. Tasma puja maupun masyarakat untuk mencari solusi terbaik. 2. Meninjau langsung tanah yang berkonflik. 3. Memberikan arahan untuk masyarakat supaya tidak main hakim sendiri. 4. Memanggil pihak-pihak yang berkonflik untuk diadakan rapat dikantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu mencari jalan yang terbaik supaya kasus konflik tanah ini cepat selesai.

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi Purnama selaku Kepala Desa Alim dalam wawancara sebagai berikut : “ kami sudah melakukan musyawarah penentuan batas wilayah, yang dihadiri oleh lima kepala desa dalam musyawarah penentuan batas lahan adat, lokasi lahan masyarakat Desa Alim dalam batas adat yang di kuasai oleh PT Tasma Puja berada di kawasan batas pemuncak, sedangkan Desa Kepayang Sari dan Cenaku Kecil berada di areal batas penghubung. Selain itu juga dilakukan mediasi namun tak juga mendapat titik terang untuk penyelesaian konflik yang terjadi.” (Wawancara Selasa, 17 Maret 2024)

3. Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi Kepemilikan Lahan Masyarakat Aim di Desa Kepayang Sari

Sampai sekarang belum ada jalan atau titik untuk menyelesaikan konflik tanah baik di Desa Kepayang Sari maupun di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu bahkan samapai sekarang pemerintah Kecamatan diam saja seakan tidak ada lagi jalan yang harus dilakukan untuk mneyelesaiakan konflik

tanah yang terjadi di Desa tersebut.

Desa Kepayang Sari dengan luas 48 km yang terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Kepayang Condong, Dusun Lubuk Kandis, Dusum, Dusun Gudang/Pinang Gati, Dusun Lubuk Sungkai dan Dusun HPH Sedangkan Dusun HPH tidak ada bermasalah di karenakan tidak ada bermitra/kerja sama dengan perusahaan PT. Tasma Puja sedangkan Empat Dusun bermitra dengan perusahaan PT Tasma Puja Dusun Kepayang Condong dengan luas Tanah 214 Ha, sedangkan Dusun Lubuk Kandis Seluas 294 Ha sedangkan Dusun Gudang/Pinang Gati Seluas 234 Ha dan Dusun Lubuk Sungkai seluas 542 Ha jadi jumlah perkebunan kelapa sawit seluas 1.289 Ha.

Namun konflik antar desa Kepayang Sari dan Desa Alim dengan PT Tasma puja memuncak ketika terjadinya pengeroyokan atau kekerasan terhadap security PT. Tasma puja oleh masyarakat Desa kepyang Sari pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wib, dan dilakukannya manen sawit masal di PT. Tasma Puja oleh masyarakat Desa pada tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib. Berikut Ungkapan Bapak Sriwahyu Hariyant, TY., S.P., M.P selaku Pemerintah Daerah KABUPATEN Indragiri Hulu : “Upaya pemerintah dalam melakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa bahwa pada upaya mediasi ini konflik belum dapat di selesaikan.

Konflik pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan terutama di Desa Kepayang Sari dan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku yang mana masyarakat Desa Kepayang sari sampai saat ini belum menerima ganti rugi yang di janjikan

oleh PT. Tasma puja yang mana mulanya kebun karet yang punya masarakat Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.”

(Wawancara Senin, 25 Maret 2024) Pendapat tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Camat Batang Cenaku sebagai berikut : ” kami sudah melakukan langkah mediasi antar actor yang memilik konflik yaitu PT. Tasma Puja, Desa Kepyang Sari, dan Desa Alim. Mediasi dilakukan dengan azas kekeluargaan dan suka sama suka, namun apabila mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil maka kita akan mengambil jalur hokum sesuai peraturanperundang-undangan.” (Wawancara Senin 18 Maret 2024)

Dari wawancara tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Amanah UU Nomor 203 tahun 2014 dapat mengintervensipenyelesaian konflik dalam kasus ini, penerapan prinsip win-win solution seyogyanya diterapkan guna menetralsisir permasalahan yang tak kunjung menemukan titik terang. Dengan menimbang manajemen konflik perlu diperhatikan dalam menanggapi konflik ini, sehingga konflik yang terjadi antara ketiga belah pihak mampu diselesaikan bahkan memberikan dampak positif untuk ketiganya.

4. Pemerintah Daerah Dalam Reslusi Knflik Antara PT. Tasma Puja Di Desa Kepayang Sari Dengan Masyarakat Desa Alim

Dalam konflik ini ada actor-aktor pemerintahan yang harus terlibat dalam penyelesaian konflik in ianantara lain pemerintah Desa Alim, Desa Kepayang Sari dan andil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang diamanahkan undang-undang. Dalam Stakeholder yang paling bertanggung jawab dalam konflik ini yaitu BPN

Wilayah Indragiri Hulu.

Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh BPN objek sengketa masuk dalam kawasan hutan dan berada di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku. Sehingga BPN tidak bisa berbuat banyak dan hanya dapat meminta PT. Tasma Puja untuk segera mengurus izin pelepasan kawasan hutan kepada menteri kehutanan RI. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi Sumbari, SAB mengenai pihak yang paling bertanggung jawab dalam konflik yang tengah terjadi saat ini : “ konflik pertanahan ini terjadi dikarenakan tidak adanya Inventarisir lahan dalam melakukan transaksi jual beli di Desa, sehingga pihak Desa Menjadi kesulitan untuk memilah mana tanah warga yang sudah diperjual belikan atau belum. Yang bertanggung jawab dalam hal ini tentunya adalah kepala Desa.” (Wawancara Senin, 18 Maret 2024)

BPN menjelaskan bahwa kasus ini terjadi dikarenakan belum jelasnya tapal batas antara Desa Alim dan Desa Kepayang Sari. Sedangkan permasalahan tapal batas desa seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintahan daerah Indragiri Hulu dinilai tidak melakukan kewajibannya dalam penyelesaian sengketa lahan antara Desa Alim dan Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku, seluas 92,36 dari 110 hektare yang dikuasai PT. Tasma Puja atas nama Desa Kepayang Sari.

Untuk itu, BPN meminta kepada pihak terkait untuk menetapkan tapal batas antara ke dua (2) desa yang bersengketa, sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan. Selain itu batas desa yang berbatasan administrasi wilayah desa yang berbatasan dengan areal PT. Tasma Puja khususnya Desa Alim dan Desa Kepayang Sari harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu.

Hal ini dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Desa Kepayang Sari dan Penyaguan sehingga diketahui secara jelas batas-batas desa tersebut.

Berikut wawancara dengan Bapak Camat Batang Cenaku seputar Batas lahan : “ Ada beberapa steatmen mengenai ini diantaranya adalah, 1. Masing-masing pihak mengklaim bahwasanya batas adat sudah ada secara turun temurun, 2. Karena adanya nilai tersebut diatas maka lahan

• Kesimpulan

Peran pemerintah dalam kasus resolusi konflik lahan selama 2013 belum banyak yang diselesaikan walaupun tidak terdengar masyarakat menyuarakan tentang konflik hal itu lebih disebabkan tidak jelasnya agenda penyelesaian konflik pertanahan di Riau dan persoalan itu pertanahan di Riau dan persoalan itu dapat diperpanjang sesuai dengan yang diinginkan.

Namun, apabila dibenarkan mendahului untuk menarik sebuah ungkapan tentang pola resolusi konflik lahan selama 2013 adalah absennya agenda penyelesaian konflik lahan di Riau, sehingga tidak ditemukan arah yang jelas tentang penyelesaian masalah lahan. Agenda penyelesaian konflik pertanahan itu baru dibahas atau diselesaikan apabila muncul lagi permohonan dari masyarakat atau apabila ada unjuk rasa.

Alasan yang selalu dikemukakan terutama oleh Pemerintah Propinsi Riau adalah kewenangan penanganan konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya pada Pemerintahan Kabupaten Kota. Dengan melihat kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di Propinsi Riau solusi yang diambil untuk menyelesaikannya dapat diupayakan melalui: a. Musyawarah; b. Mediasi; c. Jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Yusuf. 2016. Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Pedagang Kaki lima (PKL) Di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 2 (2): 805-812
- Agustinova, D. E. 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik). Yogyakarta: Calpulis.
- Kansil, C.S.T., 2008. Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah). Jakarta: Sinar Grafika,
- Moleong, L. J. 2017. Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusmadi, M. 1991. Penyelesaian Sengketa hak Atas Tanah. Bandung: Bandung Maju